



BAB II

PERSPEKTIF TEORITIK

A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empoworment*) berasal kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dengan keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengansumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat berubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan daat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Suharto yang dikutip oleh Agus Salim pemberdayaan adalah:



1. Pemberdayaan bertujuan untuk ingkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi orang terhadap kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
3. Pemberdayaan menunjuk kepada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.⁹

Istilah “Pemberdayaan” adalah terjemah dari istilah asing “Empowerment”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.¹⁰

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 57-58.

¹⁰ Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal 41-42.



maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.¹¹

Sedang menurut ife dalam bukunya Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut keputusan-keputusan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas.

2. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata masyarakat dan nelayan, agar lebih jelas penulis akan memberikan pengertian dari masing-masing kata tersebut kemudian arti secara keseluruhan.

a. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut Society (berasal dari kata latin, socius yang berarti "kawan"). Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang artinya

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 59-60.



ikut serta atau berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.¹²

Menurut Hasan Sadly dalam bukunya yang berjudul "sosiologi untuk masyarakat Indonesia" masyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.¹³

Kemudian menurut Djodjodigoea masyarakat mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit masyarakat adalah terdiri dari satu golongan saja, sedang dalam arti luas masyarakat adalah kebulatan dari semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat dan meliputi semua golongan.¹⁴

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Koentjaraningrat dalam "Ilmu sosial Dasar" masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (input) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 119-120.

¹³ Hassan Sadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), hal 31.

¹⁴ M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1984), hal 21.

masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (output) dari proyeksi tersebut.¹⁵

b. Pengertian Nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Dalam kamus besar Indonesia Pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan dilaut.¹⁶

Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah disebutkan diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa:

1. Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut.
2. Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

Jadi pengertian masyarakat nelayan secara luas adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup

¹⁵ Darmansyah dkk, *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, (Surabaya:Usaha Nasional,1986), hal 80.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989), hal 612.



kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun *fondasi civil society* di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan social ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.¹⁷

Tujuan pemberdayaan di atas dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat, dan kebijakan atau strategi pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua

¹⁷ Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (2007: LkiS, Yogyakarta), hal 39.

¹⁸ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan pesisir*, (Bandung: humaniora, 2006), hal 35.



pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.

- b.* Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka.
- c.* Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- d.* Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman.
- e.* Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara kepulauan Republik Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:



1. Asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di kawasan pesisir.
3. Asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

Sinergi ketiga asas di atas dalam praktek sosial pemberdayaan diharapkan memberikan kontribusi besar untuk (a) membangun kemandirian masyarakat nelayan, (b) meningkatkan bargaining position terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan



pembangunan kawasan, (c) memperkuat akses ekonomi-politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan (d) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Pencapaian keempat hal tersebut akan menjadi tiang utama untuk mewujudkan konstruksi civil society dalam transformasi masyarakat yang demokratis dan pemerintahan lokal yang bersih (clean local government).*

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam konteks kerja sama lintas pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.



4. Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak.

Schuler, Hashemi dan Riley¹⁹ mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indek pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis.

Tabel 1

Rangkuman tentang indicator keberdayaan²⁰

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara - Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Assertiveness</i> dan proses hukum, politik otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 63.

²⁰ *Ibid.*, hal 65.



<p>Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap pelayanan keuangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan, termasuk kemelekan huruf - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan produktif - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah - Pengetahuan mengenai dan kebudayaan - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
<p>Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-hambatan, sumber, dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan - Kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya - Kontrol atas akses produktif dan kepemilikan keluarga - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga - Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik
<p>Kekuasaan dengan: meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - Tindakan bersama untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis - Tindakan

<p>hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan mikro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu member gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas rumah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro 	<p>meningkatkan kesejahteraan public</p>	<p>bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, pilitis hukum pada tingkat masyarakat dan makro
---	--	--	--

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat,²¹ yaitu:

a. *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesan.

b. *The Welfare Strategy*

Startegi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi

²¹ A. Halim, *Pengembangan Masyarakat Islam: Upaya Membangun Paradikma Baru Model Dakwah* (Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 1, April 2001), hal 1920.



dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.

c. The Responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan

d. The Integrated or Holistic Strategy

Untuk mengatasi delima pemberdayaan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif strategi pemberdayaan.

Oleh karena itu dalam strategi ini terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:



1. Persamaan, keadilan pemetaan dan partisipasi merupakan tujuan yang eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh sehingga badan publik yang ditugasi melaksanakan harus:
 - a. Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
 - b. Intervensi dilakukan untuk memperkokoh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya serta mengambil langkah-langkah instrumental yang dibutuhkan kemampuan aparatur (pemerintah atau *policy maker*) untuk melakukan intervensi sosial.
2. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan public yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya dari strategi *holistic* tersebut, yakni untuk:
 - a. menentukan arah nilai organisasi, energi, dan proses menuju strategi.
 - b. memelihara integritas organisasi yang didukung oleh institutional leadership.
3. Keterlibatan *public* dan organisasi sosial secara terpadu, memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supraorganisasi yang bertugas antara lain:
 - a. membangun dan memelihara perspektif menyeluruh.



- b. melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan.
- c. membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (*interdependensi*) antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategis.²²

Sumberdaya pesisir berkarakter pelik dan sangat penting bagi ekosistem global kita. Pendekatan perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang sifatnya sektoral telah terbukti tidak dapat memecahkan masalah pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Begitu pula pembangunan dan perencanaan tata ruang dengan pendekatan sektoral tidak dapat mencapai pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan. Karena itulah pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu mencerminkan alternatif pendekatan yang berbeda dengan perencanaan dan pengelolaan tradisional bagi wilayah pesisir. Dalam konteks ekonomi daerah, kewenangan yang diberikan untuk kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri potensi kelautannya, sudah menjadi modal dasar bagi peningkatan kemampuan daerah dalam berotonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kebutuhan akan adanya institusi dan lembaga yang mampu mengarahkan, menjembatani dan memfasilitasi pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan, menjadi faktor penting yang paling mutlak dalam mencapai hasil yang maksimal. Pembentukan institusi dan

²² Moh. Ali Aziz, et. al. (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradikma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal 10-11.



kelembagaan dibidang kelautan dan perikanan secara teritorial hendaknya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. adanya kewenangan yang jelas memungkinkan daerah kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri potensi kelautan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi msyarakat.
2. wilayah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kota kian memperkuat pemerintah kota mengambil kebijakan dalam rangkrah memberdayakan kelautan dalam wilayah kota sesuai dengan potensi yang tersedia.
3. kelurahan sebagai wilayah pemerintah terkecil yang merupakan perangkat dari pemerintah daerah kota merupakan modal dasar dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan kelurahan sepanjang kawasan pesisir kota atau kabupaten, dan dengan mengembangkan kerja sama antara kelurahan.

Dari hal ini, peran otonomi daerah sangat penting di dalam mewujudkan otonomi di wilayah laut sehingga berhasil dalam mengembangkan dan memanfaatkan budaya laut.²³

Selama ini, pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan dihadapkan pada beberapa kendala. Setidaknya, ada delapan persoalan

²³ Ahmad Solihin, Et. All, *Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia(Bunga Rampai)*, (Bandung: Humaniora, 2005), hal 39.



pokok yang menjadi permasalahan nyata secara berkelanjutan dimasing-masing daerah. Ke delapan persoalan itu, yaitu:

1. *Over Fishing*, terutama di perairan pantai (4 mill) dan sebagian perairan lepas pantai.
2. Pemanfaatan yang tidak optimal di perairan lepas pantai dan laut dalam.
3. Teknologi, umumnya alat tangkap yang digunakan masih tradisional dan variasi alat tangkap kecil.
4. Sumberdaya Manusia, lemahnya kemampuan sumberdaya manusia dan masih rendahnya keinginan menyeluruh dari pihak birokrat untuk membangun perikanan.
5. Kerusakan habitat dan degradasi lingkungan.
6. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum.
7. Kelembagaan perikanan yang belum atau tidak profesioanl.
8. Belum adanya tata ruang pesisir.

Untuk itulah, masing-masing daerah diharapkan memiliki rencana induk kelautan dan perikanan, guna menyusun rencana penggunaan ruang kawasan pesisir dan kelautan yang dapat diimplementasikan dan mengakomodasikan seluruh potensi andalan, sehingga tidak terjadi lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan rencana, daya dukung lingkungan dan otensi yang ada.

Upaya ini sekaligus harus diikuti dengan langkah menunjang kesinambungan produksi perikanan antar wilayah sekitar kawasan pesisir

di Kabupaten dan Kota dan antar Daerah yang dapat saling terkait guna menumbuhkan pasar yang kompetitif serta mewujudkan pemerataan pemangunan di Daerah, sekaligus mengemangkan komoditas perikanan dalam skala besar guna mendorong peningkatan sektor agrobisnis. Tujuannya, selain sebagai pendapatan kelembagaan kelautan dan perikanan yang sudah ada, juga untuk identifikasi dan kajian kegiatan yang dapat digabungkan menjadi satu kegiatan usaha kelautan dan perikanan.²⁴

6. Dakwah Pemberdayaan

Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa arab “*da’a, yad’u, da’watan*” yang berarti ajakan, seruan, undangan, panggilan.²⁵

Sedangkan secara terminologi sesuai dengan firman Allah SWT surat Ali Imron ayat 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*²⁶

Dakwah juga dapat diartikan perbaikan dan pembangunan masyarakat (*ishlah*)²⁷ yang meliputi:

²⁴ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan pesisir*, (Bandung: humaniora, 2006), hal

²⁵ Husaen Segaf, dkk, *Pedoman Pembinaan Dakwah Bil Hal*, (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Peneragaan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1997), hal 7.

²⁶ Deparement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal 79.

²⁷ A. Sudarji, *Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal 28.

- a. Melaksanakan amanah Allah SWT yang meliputi amanah ibadah dan khilafah.
- b. Menegakkan yang makruf dan memberantas kemungkaran (Al-Amru).
- c. Al-Ma'ruf wan nahyu anil munkar.
- d. Merubah situasi kepada situasi yang lebih baik.
- e. Perbaiki dan pembangunan masyarakat.
- f. Merealisasikan ajaran agama islam dalam segenap aspek hidup dan kehidupan manusia.

Dakwah sebagai agen perubahan (*change agent*) mempunyai arti yang luas, yaitu mengubah manusia ke arah yang lebih baik untuk memberikan pengaruh perubahan pada tingkah laku manusia sesuai yang dikehendaki dakwah. Oleh karena itu komponen dakwah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia perlu dikembangkan.

Seperti sabda Rasulullah SAW.

خير الكسب كسب يدالعامل اذانصح (رواه أبو هريرة)

Artinya: Nabi SAW bersabda :” usaha yang penting baik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya jika ia jujur (bemaksud baik)”(di riwayatkan oleh Abu Hurairah)²⁸

Kalimat *kasbu yadil amali* dalam hadist tersebut yang berarti usaha seseorang dengan tangannya dan dapat dimaknai dengan nelayan. Karena

²⁸ Fachruddin dan Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rosul (Hadist-Hadist Pilihan)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal 236.



dengan melakukan sesuatu dengan tangannya berarti seseorang dapat dituntut dapat menciptakan sesuatu dan dapat memanfaatkan peluang dan kemampuan yang dimiliki dengan berusaha dengan menciptakan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan berkarya tanpa berhenti untuk berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada agar dapat mencapai keuntungan yang optimal.

Dengan demikian dalam melakukan sesuatu usaha (nelayan), disamping harus mempunyai atas kerja yang tinggi, seseorang muslim harus mempunyai jiwa semangat agar berusaha dapat berkembang dengan baik, karna pada hakekatnya bekerja sebagai seorang nelayan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif.

Menurut A. Suryadi yang dikutip oleh Yahya Mansur, dakwah pemberdayaan masyarakat adalah aplikasi dan fungsi manusia di dunia untuk beribadah dan mengelola bumi seisinya perlu dikembangkan.²⁹

7. Prinsip Dakwah Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kajian konsep dasar pemberdayaan masyarakat yang dilanjutkan dengan merekonstruksi dakwah sebagai dari upaya membangun paradigma baru model dakwah, maka dakwah pemberdayaan masyarakat harus mengikuti prinsip dasar, yaitu:

Pertama, orientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luar, dakwah tidak hanya dilaksanakan hanya sekedar memuaskan

²⁹ Yahya Mansur, *Dakwah Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994), hal 18.



keinginan sebagian masyarakat saja, melainkan direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan, kesenang-wenangan tidak lagi hidup di tengah-tengah mereka. Skala makro menjadi sasaran dakwah, bukan berarti meninggalkan skala mikro kepentingan individu anggota masyarakat. Apalagi jika elit-elit tersebut merupakan sekelompok pembuat kebijakan yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan social. Maka adalah mutlak sebenarnya dakwah yang ditujukan kepada mereka dalam upaya menyadarkan dan mengingatkan terhadap persoalan-persoalan kehidupan social yang ada dalam masyarakat.

Kedua, dakwah pemberdayaan masyarakat pada dasarnya upaya melakukan sosial *engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan tata kehidupan sosial yang lebih baik. Dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perencanaan perubahan social yang berlandaskan kepada nilai-nilai islam, sasaran utama dakwah pemberdayaan masyarakat terhadap individu per individu.³⁰

B. Landasan Teori

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

³⁰ *Ibid.*, hal 18.

³¹ Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2007), hal 3-5.



Pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diperdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberi pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan.

Kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut kemampuan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlibat dulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau untuk membuat mereka “cakap” dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses pemampuan terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

Ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau “*empowerment*” dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Suatu diskursus pemberdayaan selalu akan dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi. Kieffer



dalam Edi Suharto mendeskripsikan secara konkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu; “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah; kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai *deviant* atau menyimpang, kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor struktural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Twelvetrees yang dikutip dalam buku Edi Suharto membagi perpektif teoritis pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal.³² Pendekatan professional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki pembagian layanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sedangkan pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidak seimbangan relasi-relasi social yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasan.

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 40.

Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral, dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional.

Table 2

Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/Asumsi
Professional (Tradisional, Netral, Teknikal)	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan masyarakat • Pengorganisasian masyarakat • Pembangunan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat. • Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi social yang ada.
Radikal (Transformasional)	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi masyarakat berdasarkan kelas • Aksi masyarakat berdasarkan jender • Aksi masyarakat berdasarkan ras 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat. • Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. • Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi social yang menisdas, diskriminatif, dan eksploitatif.



C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Membahas mengenai kajian penelitian yang terdahulu, berikut ini adalah beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu :

1. Skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Merupakan hasil karya dari Moh. Imron Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2007.

Dalam penulisan skripsi, peneliti mengkaji tentang:

- a. partisipasi dan strategi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- b. Relevansi partisipasi dan strategi pengembangan masyarakat islam.

Dari dua fokus masalah yang diangkat sehingga dapat diketahui bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam upaya memberdayakan dan pembangunan masyarakat pesisir sangat rendah, hal ini disebabkan banyaknya birokrasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang ikut campur dan tidak mengedepankan partisipasi masyarakat secara umum.

Sedangkan dalam penerapan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir juga lebih bersifat *top down*, yang ini berimbas kepada hasil dari sebuah pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak tepat sasaran, karena tidak mengikutsertakan masyarakat yang secara umum adalah pelaksana dari sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan.



2. Skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kepulauan Gili Raja Sumenep merupakan hasil karya dari Muhallil Wasit jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Pada Tahun 2009.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengkaji Bagaimana Model Pembangunan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Yasinan dan Arisan di Kepulauan Gili Raja Sumenep. dengan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui model Pembangunan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Yasinan dan Arisan di Kepulauan Gili Raja Sumenep.

3. Skripsi yang berjudul Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan hasil karya dari Agus jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Pada Tahun 2011.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengkaji Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Dengan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.